



Ratusan Aset Pemkab Belum Bersertifikat

NANGA PINOH. Kendati sudah sembilan tahun berdiri mandiri dari Kabupaten Sintang, ternyata masih banyak aset Pemkab Melawi yang belum memiliki sertifikat. Padahal sertifikat sangat penting, memberikan kepastian hukum kepemilikan aset yang kini dikuasai Pemkab Melawi.

"Baru 114 bidang aset tanah saja yang kini sudah memiliki legalitas hukum alias bersertifikat dari total tanah milik Pemkab ada 453 bidang. Sisanya masih dalam proses, adanya yang kita peroleh dari berbagai kecamatan, fasilitas

dibuat baru sertifikatnya," kata Kabid Aset, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Melawi, Syarifuddin, kemarin.

Syaripudin mengungkapkan, aset-aset yang dimiliki Pemkab Melawi memang sebagian besar merupakan penyerahan aset atau P3D dari kabupaten Sintang saat pemekaran kabupaten 2004 silam. Saat itu, ada 542 bidang tanah yang terdata, dan ikut diserahkan ke kabupaten Melawi. Tanah ini sendiri bermacam-macam bentuk, milik sekolah, kecamatan, fasilitas kesehatan sampai sejumlah tanah perkantoran.

"Hanya persoalannya saat ini hanya ada 25 bidang tanah yang diserahkan bersamaan dengan sertifikatnya. Satu bidang lagi masih dalam bentuk Surat Keterangan Tanah (SKT), terangnya. Sehingga, tambah Syarifuddin, terdapat 516 bidang lagi yang tak jelas dokumen kepemilikannya. Sebagian bahkan masih berada di kabupaten Sintang sebagai kabupaten induk.

"Ini yang kita urus sekarang yaitu minta penyerahan dokumen

tersebut dari sintang. Makanya kita meminta agar kabupaten Sintang menyerahkan dokumen aset tersebut terutama untuk aset yang sudah diserahkan pada kabupaten Melawi. Yang lain kita lakukan sertifikasi tanah sendiri ke BPN," jelasnya.

Tahun ini sendiri, papar Syarifuddin, sudah ada 28 sertifikat tanah baru yang merupakan aset Pemkab Melawi. Sebelumnya pada 2012 silam, Pemkab berhasil membuat sertifikat di atas 24 bidang tanah sehingga total tanah yang sudah ada sertifikatnya

mencapai 114 bidang. Aset-aset ini tersebar di seluruh kecamatan di Melawi.

"Sertifikat lahan bagi aset Pemkab Melawi memang sangat diperlukan agar pengelolaan aset kita bagus dan kuat secara hukum. Ini juga menjadi salah satu langkah agar penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKDDP) Melawi tahun depan bisa naik menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari tahun ini yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI," pungkasnya. (aji)